

Bab I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak awal abad ke-19, beberapa perempuan Indonesia secara perorangan telah tampil di panggung sejarah untuk membela Tanah Air dan Bangsaanya, misalnya Siti Aisyah We Tenriolle (Sulawesi Selatan), Christina Martha Tiahahu (Maluku), Nyi Ageng Serang (Jawa Tengah), dan Cut Nyak Dien (Aceh).¹ Pada masa itu, umumnya masih banyak perempuan Indonesia yang terbelenggu dalam aturan-aturan adat, seakan-akan mereka terkucilkan dari masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Keadaan umum perempuan seperti ini berlangsung sampai menjelang akhir abad ke-19.

Pada akhir abad ke-19, rakyat Indonesia dari kalangan atas maupun kalangan rakyat pada umumnya mulai menampakkan keinginan memperbaiki kehidupannya di segala bidang, perbaikan-perbaikan yang dimaksud tidak hanya menyangkut kaum laki-laki saja, melainkan juga perbaikan untuk kaum perempuannya. Usaha perbaikan ini mendapatkan titik terang yaitu pada saat terjadinya perubahan-perubahan dalam politik penjajahan Pemerintah Belanda pada masa itu. Perubahan politik penjajahan ini diakibatkan karena adanya pergeseran kebijaksanaan ekonomi, dari sistem monopoli menjadi sistem permodalan swasta, hal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan umum dalam

¹ Siti Aisyah We Tenriolle (diangkat menjadi Datuk atau Raja kerajaan Tanette, Sulawesi Selatan pada tahun 1856), ia merupakan seorang yang cerdas dan berpengalaman luas, memerintah daerah kekuasaannya dengan efektif. Pada tahun 1908 di usianya yang sudah tua ia mendirikan sekolah yang memberikan pendidikan modern pertama di Tanette yang dibuka baik untuk anak laki-laki maupun anak Perempuan, . Christina Martha Tiahahu berjuang dengan gigih melawan Belanda , Nyi Ageng Serang, ketika Perang Diponegoro melawan penjajah, Nyi Ageng Serang menggabungkan dirinya kedalam pasukan Diponegoro kendati usianya telah lanjut, dan Cut Nyak Dien, berjuang menghadapi pasukan Belanda dengan gigih. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V, Zaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Hindia Belanda*. (Jakarta 2008), hal. 401-402, Hj. Pocut Haslinda Syahrul, MD. *Perempuan Aceh, Dalam Lintas Sejarah Abad VIII-XXI*. (Jakarta, 2008), hal.105

masyarakat Hindia Belanda². *Ethische Politiek* merupakan salah satu sarana untuk menunjang politik ekonomi baru itu.

Dengan adanya *Ethische Politiek* di Hindia Belanda, yaitu yang mengandung tiga unsur utama: Edukasi, Transmigrasi, dan Irigasi. Secara tidak langsung membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Ethische Politiek* sesungguhnya tidak hanya mempunyai aspek perikemanusiaan saja tetapi juga sifat ekonomis, karena dengan adanya golongan pribumi yang lebih maju dan lebih mampu maka mereka akan lebih mampu pula untuk membeli barang industri yang diimport dari negeri Belanda. Selain itu, *Ethische Politiek* juga mempunyai aspek politik yaitu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Belanda berhasil dan pandai mengurus tanah jajahannya. Hal ini menjadi penting, karena pada saat itu terjadi persaingan antar Negara Eropa yang mempunyai tanah jajahan di Asia dan Afrika. Dari ketiga agenda tersebut, ternyata Edukasi/pendidikan menduduki tempat yang paling penting sebagai faktor yang mempengaruhi proses perubahan dalam masyarakat Indonesia.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari kemajuan pendidikan ini adalah kesejahteraan dan peningkatan derajat serta persamaan kedudukan dalam masyarakat bagi bangsa Indonesia terhadap bangsa asing yang berada di negeri ini. Pendidikan akan membuka keterasingan dan pikiran, serta dapat menerima pemikiran-pemikiran maupun ilmu pengetahuan baru dari luar.³

Pada awalnya, pergerakan perempuan Indonesia hanya berjuang untuk mempertinggi kedudukan sosialnya di masyarakat dalam hal kehidupan keluarga dan perkawinan serta memperluas pengetahuannya sebagai ibu dengan cara menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan dan mempertinggi keterampilan-keterampilan perempuan yang bersifat khusus. Pada persoalan politik hal ini tidak dibicarakan, karena pada saat itu kedudukan kaum laki-laki mengenai hak politiknya pun belum jelas.

Hal yang menyebabkan kaum perempuan peduli akan nasib kaumnya adalah dikarenakan faham-faham tentang kedudukan perempuan dalam

² Untuk selanjutnya, setiap kata Hindia Belanda akan diganti dengan kata Indonesia. Hal ini dalam rangka memudahkan pembaca membedakan antara Pemerintah Belanda dengan Bangsa Indonesia

³ Depdikbut, *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional*, (Jakarta, 1992)

perkawinan dan hidup berkeluarga. Banyak perkawinan yang dipaksakan, poligami, adanya kekuasaan yang tidak terbatas dari laki-laki atas perempuan dalam perkawinan (dapat menceraikan tanpa memberitahu sebab yang jelas dan tidak bertanggung jawab atas isteri yang diceraikannya), adanya aturan untuk anak gadis harus tinggal di rumah, yaitu semenjak ia menginjak usia dewasa dan pada saat itu juga secara otomatis maka ia dilarang untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini terjadi pada lapisan sosial masyarakat tingkat atas. Pada hal, peranan dari pendidikan itu sangat penting bagi kemajuan diri dan masyarakat, membangun pola pikir yang maju.⁴ Pada awalnya pergerakan kaum perempuan ini hanya dilakukan oleh orang perorangan, contoh yang terkenal adalah R.A. Kartini.

Pada tahun 1912 dibuka sekolah Kartini pertama di Semarang, setelah itu bermunculanlah sekolah-sekolah puteri dari cabang sekolah Kartini di Jakarta (1913), Madiun (1914), Malang dan Cirebon (1916),⁵ ataupun sekolah-sekolah puteri lainnya, misalnya Sekolah Kautamaan Isteri di beberapa tempat di Priangan, dan lain sebagainya.⁶ Keadaan berubah kearah yang lebih baik untuk kaum perempuan pada lapisan masyarakat tingkat atas (bangsawan). Dengan banyaknya perluasan sekolah-sekolah, kesempatan bagi kaum perempuan untuk menuntut ilmu lebih banyak. Adanya perluasan sekolah-sekolah ini pun tidak terlepas dari peranan organisasi-organisasi kaum laki-laki yang menyetujui adanya pengajaran bagi kaum perempuan. Dengan banyaknya kaum perempuan yang terpelajar, maka hal ini dapat mempermudah ruang gerak perempuan-perempuan ini untuk memperluas tujuannya, tidak hanya pada kalangan atas (bangsawan) saja, tetapi juga sampai menembus kepada kalangan bawah (petani, dan lain-lain).⁷ Hal ini berdampak luas terhadap corak perjuangan perempuan setelah tahun 1920, yaitu banyak bermunculan perkumpulan-perkumpulan perempuan.⁸

⁴ Pendidikan yang dimaksud adalah tidak hanya mencakup pendidikan persekolahan (formal) saja, melainkan juga pendidikan moral, karena perempuan sebagai peletakkan dasar watak dan kepribadian anak. Bunga Rampai Karangan Mengenai Kartini, *Satu Abad Kartini*, (Jakarta, 1990), hal. 32. Pendidikan harus dimulai sedini mungkin, dan hal ini menyangkut dengan peranan kaum perempuan sebagai "Ibu Bangsa".

⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, Op. Cit., hal 404

⁶ Depdikbud, Op. Cit., hal.33-34

⁷ Orang-orang yang berada pada golongan kalangan atas adalah orang-orang yang mempunyai status, penghidupan kesejahteraan yang baik, seperti bangsawan, sedangkan kalangan bawah adalah yang status, tingkat kehidupannya kebalikan dari kalangan atas.

⁸ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta, 1994), hal 109

Dengan bertambah banyaknya jumlah pelajar pribumi yang mendapatkan pengajaran dari sekolah-sekolah barat khususnya dari kalangan priyayi, dunia barat dan peradabannya lengkap dengan sistem politik, sosial, dan ekonominya mulai lebih dikenal. Sangat mengesankan tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh dunia barat, ditambah dengan posisi sosial Belanda yang sangat terpandang di mata bangsa pribumi, hal itu menyebabkan timbulnya aspirasi-aspirasi untuk mengadakan invansi atau modernisasi menurut model barat pada umumnya dan Belanda pada khususnya.

Terbukalah pada persepsi mereka bukan hanya tingkat dan gaya hidup saja yang berbeda antara pribumi dengan Belanda atau Eropa, melainkan juga serba keterbelakangan dan kuno sistem kehidupan tradisional itu. Mulai disadari perbedaan kualitas hidup antara gaya Barat yang serba bebas dengan pola kehidupan Tradisional yang penuh dengan keterikatan.⁹

Dengan adanya perjuangan emansipasi yang dirintis oleh R.A. Kartini pada penghujung akhir abad ke-19, dunia perjuangan Indonesia tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki saja, melainkan ada peran serta kaum perempuannya juga. Hal ini dapat terlihat dengan bermunculannya organisasi-organisasi perempuan pada masa pergerakan Nasional itu.¹⁰

Berbagai kegiatan telah dilakukan, baik secara perorangan maupun melalui perkumpulan-perkumpulan untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan kepada sesama perempuan dan masyarakat umum. Organisasi perempuan yang muncul pada awal abad ke-20, semula umumnya hanya bersifat sosial-budaya, lebih menekankan perjuangannya pada perbaikan kedudukan sosial perempuan, seperti hal-hal yang menyangkut perkawinan, keluarga, peningkatan keterampilan perempuan, serta pendidikan. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan pada saat itu umumnya yaitu tentang emansipasi. Lambat laun perjuangan kaum perempuan tidak hanya sebatas tentang kehidupan sosialnya saja, tetapi juga mengenai bidang politik.

⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2*, (Jakarta, 1999), hal. 84

¹⁰ Drs. Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia, dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*, (Semarang, 1995), hal. 130

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda kaum perempuan Indonesia mengusahakan persatuan dan kerjasama antara organisasi-organisasi perempuan untuk mencapai cita-citanya. Dijiwai oleh Sumpah Pemuda 1928 dan atas inisiatif 7 organisasi perempuan Indonesia, yaitu Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Puteri Indonesia, Aisyiyah, Jong Islamieten Bond bagian perempuan, Wanita Khatolik, dan Jong Java bagian perempuan, maka pada tahun 1928 perkumpulan-perkumpulan perempuan ini mengadakan kongres, yang dikenal dengan Kongres Perempuan Indonesia.

Kongres ini diadakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Tujuan diadakannya kongres ini adalah merekatkan tali persaudaraan, mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan perempuan Indonesia, dan juga mengadakan gabungan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan itu. Salah satu keputusan kongres ini yaitu membentuk suatu badan Federasi, yang diberi nama *Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI)*, yang bertujuan memberikan penjelasan tentang peranan perempuan dan sebagai perantara perkumpulan yang tergabung didalamnya. Agenda-agenda PPPI adalah mendirikan *Studiefonds* untuk anak-anak perempuan yang pandai tetapi tidak mampu, berusaha mengadakan kursus-kursus kesehatan, menentang perkawinan anak-anak dan memajukan kepanduan untuk anak-anak perempuan.¹¹

PPPI ini kemudian berganti nama menjadi *Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII)* pada tahun 1929, karena sesuai dengan keadaan saat itu.¹² Perikatan ini bukanlah suatu persatuan bulat (Fusi atau Uni), tetapi merupakan gabungan dari perkumpulan-perkumpulan (Federasi). PPII menghargai dan menghormati haluan pergerakan dari setiap perkumpulan perempuan yang tergabung didalamnya. Anggaran Dasar PPII yang terbentuk mempunyai tujuan mengadakan hubungan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan untuk memperbaiki nasib dan derajat perempuan Indonesia dan tidak mencampuri dalam urusan politik dan agama. Dengan terbentuknya Anggaran Dasar tersebut, hal ini merupakan kemajuan bagi kaum perempuan Indonesia pada masa itu.

¹¹ "Kongres Perempuan Indonesia II," *Bintang Timoer*, hal.2

¹² "Sedikit tentang Kongres Perempuan Indonesia (KPI)," *Keoetamaan Istri*, (Oktober 1940), hal.6. "PPII sebagai Perikatan," *ISTERI*, tahun ke-1 (Oktober-November 1931), hal. 84, tidak dijelaskan alasan pastinya P.P.P.I. berganti nama menjadi P.P.I.I.

Antara Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tahun 1928 dan Kongres Perempuan Indonesia yang kedua tahun 1935, diadakan 4 kali Kongres PPII/PPII; PPII yaitu di Jakarta (28-31 Desember 1929) dan setelah PPII berganti nama pada tahun 1929 menjadi PPII, kongres diadakan di Surabaya (13-18 Desember 1930), di Surakarta, Solo (25-29 Maret 1932), dan di Mataram, Yogyakarta (06-08 Mei 1933). Hal-hal yang selalu mendapat perhatian dari Kongres adalah mengenai masalah:

1. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam)
2. Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perkawinan
3. Mencegah perkawinan anak-anak
4. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Khusus bagi anak-anak gadis didirikan Yayasan "Seri Derma", yang bertujuan untuk membantu anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolahnya.¹³

Melihat dari apa yang menjadi pusat perhatian pembahasan didalam kongres, maka kita dapat mengetahui tujuan pergerakan dari Badan federasi ini, yaitu masih seputar masalah tentang kedudukan kaum perempuan dalam sosial masyarakat. Hal yang terpenting dalam perkembangan PPII adalah keputusan bahwa kesatuan pergerakan perempuan Indonesia berasaskan kebangsaan dan menyatukan diri sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.

Dengan adanya organisasi-organisasi perempuan baru di berbagai daerah di Indonesia yang belum menggabungkan diri dalam PPII, maka timbullah inisiatif untuk mengadakan kembali Kongres Perempuan Indonesia seperti pada tahun 1928, demi tercapainya kesatuan langkah pergerakan perempuan yang bertujuan untuk menampung dan menyatukan tenaga dan pikiran kaum perempuan Indonesia dalam rangka memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia pada khususnya dan kemerdekaan bangsa Indonesia pada umumnya, diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia II.

Kongres Perempuan Indonesia II diadakan di Jakarta, bertempat di Gedung Permufakatan, Gang Kenari,¹⁴ pada tanggal 20-24 Juli 1935. Kongres ini

¹³ Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta, 1986), hal. 56

¹⁴ "Kongres Perempuan Indonesia yang ke II," *Bintang Timoer*, (22 Juli 1935), hal. 2. Gg. Kenari adalah Jalan Kenari II/15, Senen, Jakarta Pusat

lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Dalam Kongres Perempuan Indonesia II soal buruh perempuan mendapat perhatian dari Kongres tersebut, contohnya tentang kejadian di perusahaan batik di Lasem, dimana buruh perempuan diperlakukan tidak wajar.¹⁵ Selain itu juga hal-hal yang dibicarakan dalam Kongres adalah mengenai Perbaikan Keadaan dalam Rumah Tangga dan Masyarakat Indonesia. Diharapkan akan timbul kesadaran kaum perempuan dalam peranannya sebagai ‘Ibu Bangsa’, yang artinya bahwa kaum perempuan turut menanggung atas baik atau tidaknya bangsa Indonesia yang akan datang.¹⁶ Pada Kongres ini dibentuk badan “Kongres Perempuan Indonesia” (KPI). Karena sudah terbentuk badan tersebut, maka PPII kemudian dibubarkan pada bulan September 1935.

Penelitian tentang pergerakan perempuan bukanlah tema baru dalam penulisan sejarah Indonesia. Karya-karya mengenai pergerakan perempuan pun telah ada yang diterbitkan, misalnya, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* yang disusun secara tim oleh Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*, buku ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen pendidikan dan kebudayaan, tahun 1989/1990, dan baru-baru ini, tepatnya pada bulan April 2007, telah terbit buku *Kongres Perempuan Indonesia, tinjauan ulang* yang ditulis oleh Susan Blackburn (pengajar Monash University, Melbourn, Australia).

Penelitian yang akan saya ambil adalah mengenai Perikatan Kongres Perempuan Indonesia II, tanggal 20-24 Juli 1935 di Jakarta. Saya memilih tema ini dikarenakan betapa pentingnya kesinambungan dalam memahami suatu peristiwa, mengetahui aktifitas kaum perempuan Indonesia dalam mencapai kesejahteraan kaumnya dan bahkan mengetahui seberapa jauh peranan perempuan untuk mencapai kemerdekaan. Tema ini mengangkat isu-isu yang terjadi dalam kehidupan kaum Perempuan Indonesia pada saat itu, dimana isu-isu tersebut pada zaman sekarang masih menjadi perhatian khusus kaum Perempuan Indonesia,

¹⁵ “Pergerakan dan Perkoempoelan Isteri”, *Pedoman Isteri*, 4 (April 1932), hal 63

¹⁶ “Kongres Perempuan Indonesia yang ke II”, *Pedoman Isteri*, 3 (Maret 1935), hal. 50.

seperti; adanya *human trafficking*, dll. Kongres perempuan Indonesia I, yang diadakan pada tanggal 22-25 Desember di Yogyakarta, telah ditulis oleh Inna Mirawati, yang sekarang karyanya dapat dilihat di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Oleh sebab itu, saya sebagai Mahasiswa Ilmu Sejarah, FIB UI, ingin melengkapi penulisan sejarah pergerakan kaum perempuan Indonesia dalam kegiatannya yang cukup memberikan angin segar dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, melalui bidang-bidang sosial, budaya, maupun nantinya akan merambah ke bidang politik, yaitu dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia II, tanggal 20-24 Juli 1935 di Jakarta.

I.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan jalannya Kongres Perempuan Indonesia II dan keputusan-keputusan apa saja yang dihasilkan serta penerapan hasil-hasil tersebut dalam rangka memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia pada masa itu.

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana pergerakan kaum perempuan Indonesia?
2. Mengapa Kongres Perempuan Indonesia II diadakan?
3. Keputusan-keputusan apa saja yang diperoleh dari Kongres Perempuan Indonesia II dalam usahanya memperbaiki nasib kaum perempuan?
4. Kemajuan apa yang diperoleh bagi kaum Perempuan Indonesia atas terselenggaranya KPI II, jika dibandingkan dengan KPI I?

I.3 Ruang Lingkup

Dalam pembahasan isi, hal-hal yang akan dibahas adalah persiapan Kongres dan selama pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia II berlangsung, yaitu pada tanggal 20-24 Juli 1935. Secara keseluruhan isi dari skripsi ini akan membahas mulai dari terbentuknya PPPI/PPII (1928/1929) sampai dibubarkannya PPII, dan juga pembahasan tentang Kongres Perempuan Indonesia II itu sendiri. Penulis juga memaparkan aktifitas penerapan hasil-hasil dari Kongres Perempuan

Indonesia II yang dilaksanakan melalui perkumpulan-perkumpulan perempuan yang tergabung dalam Badan Federasi PPII. Pada Konferensi PPII pada tanggal 14-15 September 1935 di Mataram, diputuskan untuk membubarkan P.P.I.I. dikarenakan sudah terbentuk Kongres Perempuan Indonesia yang akan menjalani tugas berikutnya dalam rangka memperbaiki kesejahteraan kaum perempuan.

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam usahanya memperbaiki nasib perempuan pada saat itu, dimana pada lapisan masyarakat bawah masih kurang tersentuh oleh pendidikan, adanya perdagangan perempuan, perkawinan yang dipaksakan, kesengsaraan para buruh perempuan dan berbagai macam permasalahan lain yang dihadapi oleh kaum perempuan. Apabila penelitian ini dapat memberikan kesadaran bagi kaum perempuan pada zaman ini, betapa sulitnya meraih perbaikan nasib perempuan pada saat itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah berharap dari adanya contoh kegiatan Perempuan masa lampau ini, bisa menjadi solusi untuk masa sekarang, tentunya dengan pengembangan-pengembangan yang lebih baik, yang disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini.

I.5 Metode Penelitian

Dalam tahap penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan terakhir historiografi. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu menentukan subjek yang akan diteliti, setelah itu penulis akan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan tema penulisan skripsi.

Tema yang dipilih dalam penelitian ini merupakan bagian kecil dari tema besar mengenai sejarah pergerakan rakyat Indonesia, oleh karena itu dalam mengumpulkan sumber-sumber diharuskan bersikap selektif untuk menemukan sumber-sumber yang relevan, dengan pertimbangan tidak semua sumber yang dikumpulkan dipakai untuk membahas tentang tema penelitian ini.

Sumber-sumber yang relevan diperoleh baik dari Perpustakaan Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Perpustakaan Pusat Kampus UI Depok, Perpustakaan

Kajian Wanita Kampus UI Salemba dan Perpustakaan Nasional RI. Sumber-sumber tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya kedalam sumber primer dan sekunder yang nantinya akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

Sumber primer yang dianggap relevan oleh penulis adalah artikel-artikel dari majalah *Isteri* dan *Pedoman Isteri*, sedangkan untuk surat kabar memakai *Bintang Timoer*. Sumber sekunder yang diperoleh diantaranya adalah, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* yang disusun secara tim oleh Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Tahapan berikutnya dalam penelitian ini adalah kritik, yang terdiri dari kritik ekstern dan intern. Untuk sumber primer, kritik ekstern dilakukan dengan melihat secara langsung sumber tersebut, sehingga keaslian fisiknya bisa dibuktikan. Sedangkan untuk yang diperoleh sudah dalam bentuk buku-buku teks, maka kritik ekstern tersebut sulit dilakukan, sehingga yang dilakukan adalah kritik intern. Begitupula untuk sumber primer, walaupun sudah dilakukan kritik ekstern, tetap harus dilakukan kritik intern. Kritik intern tersebut penulis lakukan dengan menguji kredibilitas sumber-sumber yang relevan terhadap tema penelitian, dalam hal ini dilakukan perbandingan dari setiap informasi yang diperoleh untuk melihat adanya pertentangan, terutama sekali tambahan dan penegasan data yang diperlukan dalam penulisan.

Interpretasi atau penafsiran terhadap data-data yang diperoleh merupakan tahap berikutnya dalam penelitian ini. Penelitian secara subjektif sedapat mungkin dihindari dan berusaha untuk bersikap objektif. Dalam tahap interpretasi ini akan dilakukan penyaringan terhadap data-data sehingga akan diperoleh fakta-fakta yang selanjutnya akan dipergunakan dalam penulisan yang juga merupakan tahapan yang terakhir, yaitu historiografi.

Tahap akhir dari penelitian ini adalah rekontruksi peristiwa yang penulis lakukan dengan cara merumuskan kembali peristiwa yang telah terjadi berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh melalui tiga tahapan terdahulu.

I.6 Sumber Sejarah

Sumber-sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas dua jenis sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan antara lain majalah yang diterbitkan oleh kaum perempuan pada tahun 1930, yakni *Isteri*, dimana majalah ini merupakan terbitan dari *Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia* (PPII) sendiri, artikel dari majalah lain yang digunakan adalah *Pedoman Isteri*, serta surat kabar *Bintang Timoer* dan *Pemandangan*. Artikel tersebut berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPII, kongres-kongres dan implementasi dari keputusan-keputusan kongres yang diadakan oleh PPII. Majalah-majalah dan Koran-koran tersebut dapat ditemukan di Perpustakaan Nasional RI, Salemba.

Sedangkan sumber-sumber sekunder yang digunakan antara lain adalah buku *Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1986., A.K. Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta : Pustaka Rakyat, 1949. Susan Blackburn. *Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2007. Buku-buku tersebut dapat ditemukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.

I.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tentang Kongres Perempuan Indonesia II ini akan dibagi menjadi 5 bab pembahasan. Susunan bab-bab tersebut akan dimulai dari pembahasan kehidupan kaum perempuan dalam masa pergerakan, Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia, sampai dengan pembahasan tentang kegiatan-kegiatan PPII dalam usahanya memperbaiki kehidupan perempuan saat itu, Kongres Perempuan Indonesia II 20-24 Juli 1935 di Jakarta.

Bab I Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah; perumusan masalah yang akan diteliti; ruang lingkup permasalahan; tujuan dari penelitian ini; metode yang digunakan dalam penelitian; sumber-sumber sejarah yang menjadi acuan; serta sistematika penulisan dari keseluruhan penelitian ini.

- Bab II Bab ini akan membahas tentang kehidupan kaum perempuan pada masa pergerakan, yang mendapat perhatian besar dari perkumpulan-perkumpulan perempuan, sehingga terbentuklah suatu Badan Federasi PPII, lalu diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia I.
- Bab III Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia II 20-24 Juli 1935 di Jakarta, mulai dari persiapan kongres, jalannya kongres, sampai dengan hasil-hasil Kongres Perempuan Indonesia II. Bab III merupakan inti dari penulisan skripsi ini.
- Bab IV Bab ini akan membahas tentang hasil-hasil keputusan Kongres Perempuan Indonesia II terhadap perbaikan nasib kaum perempuan Indonesia.
- Bab V Bab kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diajukan.

